

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permodalan merupakan faktor penting yang diperlukan dunia usaha yang tidak memandang besar kecilnya perusahaan. Permodalan dibutuhkan tidak saja pada awal pendirian suatu usaha tetapi juga untuk keperluan operasional sehari-hari, terutama dalam rangka pertumbuhan dan pembiayaan ekspansi perusahaan. Semakin tumbuh dan berkembang suatu perusahaan, peran manajemen pembiayaan (permodalan) menjadi semakin penting dan sangat diperlukan.

Sebagian pengusaha memandang bahwa masalah modal merupakan kendala utama dalam pengembangan dunia usaha. Namun sebagian yang lain menilai bahwa bukan modal yang menjadi hambatan utama. Pengembangan dunia usaha dipengaruhi oleh banyak faktor selain faktor sumber penawaran modal potensial (seperti bank) yang cukup tersedia. Kedua pandangan ini didukung para ekonom, literatur dan penelitian.

Menurut laporan Bank Dunia (2003), kegagalan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat merupakan bagian dari penyebab dasar terjadinya kemiskinan di beberapa negara berkembang (webmaster@ekonomirakyat.org). Hal yang juga merupakan salah satu tipikal masalah yang dihadapi negara sedang berkembang adalah kurangnya modal untuk investasi (Darmawan, 2006). Lain halnya dengan survei *World Economic Forum (WEF)* yang memperoleh jawaban atas pertanyaan masalah-masalah utama yang dihadapi pengusaha dalam bisnis mereka sehari-hari yaitu untuk kasus di Indonesia, hanya 4,69 persen responden yang mengatakan bahwa kurangnya akses ke keuangan merupakan kendala utama yang dihadapi mereka (Tambunan, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa responden tidak menghadapi kendala terhadap akses ke sumber permodalan.

Pembuktian empiris yang dilakukan Abramovis dan Solow menyimpulkan bahwa faktor terpenting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukan penambahan modal, melainkan yang paling penting adalah kemajuan teknologi, penambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja. Denison (1950-1962), sebagaimana dikutip Sukirno (2006), melakukan analisis faktor yang

menyebabkan perkembangan ekonomi di negara maju bukan modal, melainkan teknologi dan perkembangan keterampilan. Di Indonesia, analisis Tjahjono dkk (2006) tentang Faktor-Faktor Diterminan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, diperoleh kesimpulan bahwa peran *labor share* lebih besar dibanding peran *capital share* dalam mendorong laju perekonomian di Indonesia selama kurun waktu 20 tahun (1985-2004).

Sebagaimana umumnya terjadi di banyak negara berkembang lainnya, kredit bank sangat dominan menjadi sumber utama pembiayaan modal ekstern dunia usaha di Indonesia. Sehingga, akibat dari rendahnya penyaluran kredit bank diduga menjadi penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kredit bank menduduki posisi sangat penting dalam pasar uang jangka pendek. Bank memberikan kredit marginal yang memungkinkan perusahaan berkembang secara lebih cepat daripada yang mungkin dicapai lewat akumulasi modal melalui laba ditahan dan kredit dagang. Oleh karena itu, penolakan kredit bank sering berarti bahwa perusahaan harus memperlambat perkembangannya. (Weston-Brigham, 1985).

Hasil survey Agung, dkk. (2001) melaporkan kontribusi kredit bank terhadap pembiayaan perusahaan berkisar 24% yang terdiri dari kredit modal kerja dan kredit investasi. Sementara kontribusi sumber pembiayaan lain adalah pasar modal sekitar 6%, pinjaman luar negeri (5%), obligasi(3%), pinjaman dari kelompok usaha (*group*) sendiri (1%) dan sisanya perusahaan dibiayai dengan modal sendiri.

Untuk memperluas akses masyarakat terhadap bank, pada bulan Oktober 1988 pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan Pakto 88. Kebijakan ini memberi kesempatan dan kemudahan dalam hal pendirian bank baru dan perluasan jaringan kerja bank. Implikasinya terlihat dari berdirinya bank-bank baru dan perluasan jaringan kerja; kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas bank sampai ke daerah. Selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2008, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan kebijakan ini maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang lebih memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres

perkembangannya yang *impresif*, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. (Sumber : www.bi.go.id.)

Tabel 1.1. Posisi Kredit Dana Pihak Ketiga dan LDR Bank Umum Periode 1997- 2008 Dalam Valas dan Rupiah (Triliun)

Tahun	Penyaluran kredit	Dana Pihak Ketiga	LDR
1997	378,134	357,613	105.74
1998	487,426	573,524	84.99
1999	225,133	625,618	35.99
2000	269,000	720,379	37.34
2001	307,594	809,126	38.02
2002	365,410	845,015	43.24
2003	437,942	902,325	48.53
2004	553,548	965,079	57.36
2005	689,669	1,134,086	60.81
2006	787,136	1,298,755	60.61
2007	995,111	1,528,184	65.12
2008	1307,688	1753,292	74.58

Sumber: Bank Indonesia

Sebelum terjadi krisis ekonomi, jumlah bank yang beroperasi di Indonesia mencapai tidak kurang dari 240 buah bank. Posisi Desember 1997 menurun menjadi 222 bank. Penurunan ini terjadi karena beberapa bank melakukan *merger*, ada juga yang diambil alih serta beberapa bank yang bermasalah dibekukan. Jumlah kredit yang disalurkan bank sampai dengan periode tersebut sebesar Rp 378,134 triliun dan menghimpun dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp 357,613 triliun dengan rasio kredit dibanding DPK (*loan to deposits ratio*) sebesar 105.74 %.

Melalui tabel 1.1 terlihat bahwa setelah terjadi krisis ekonmi 1997, terjadi penurunan LDR secara terus menerus selama tiga tahun pertama pasca krisis dari 105,74 % (1997) sampai angka terendah 35.99% tahun 1999. Selanjutnya sejak tahun 2000, LDR kembali meningkat perlahan hingga pada akhir tahun 2007. Dari jumlah Rp 1.289,60 triliun DPK yang berhasil dihimpun, tersalurkan kredit sebesar Rp. 793,20 triliun sehingga LDR yang mencapai 61,51% dan posisi Desember 2008 naik menjadi sebesar 74.58%. Namun demikian, pencapaian

tersebut masih jauh dibawah LDR periode sebelum dan pada awal sesudah terjadinya krisis ekonomi 1977.

Kondisi yang berbeda ditunjukkan oleh rasio pembiayaan dengan DPK (*Finance to deposit Ratio/(FDR)*) perbankan syariah sebagaimana terlihat pada tabel 1.2 dimana FDR mendekati 100% yang menunjukkan indikasi bahwa peran intermediasi perbankan syariah dilihat dari sudut LDR atau FDR yang lebih optimal yang dicapai perbankan ini. Namun sayang, *share* perbankan syariah terhadap perbankan nasional masih sangat kecil.

Tabel 1.2 Penyaluran Pembiayaan DPK dan FDR Perbankan Syariah

Tahun.	Penyaluran Pembiayaan	Dana Pihak Ketiga	Finance to Deposits Ratio
2001	2,049.8	1,806	113.48
2002	3,276.7	2,918	112.30
2003	5,530.2	5,725	96.60
2004	11,489.9	11,862	96.86
2005	15,231.9	15,582	97.75
2006	20,444.9	20,672	98.90
2007	27,944.3	28,012	99.76
2008	38,199	36,852	96.47

Sumber: Bank Indonesia

Bank adalah lembaga intermediasi dengan kegiatan utama melakukan penghimpunan dan penyaluran dana. Saat ini di Indonesia terdapat dua sistem operasional bank. Dibedakan dengan operasional bank berdasarkan bunga, selanjutnya disebut dengan *bank konvensional* dan bank yang beroperasi berdasarkan *sistem bagi hasil* yang kemudian disebut sebagai *bank syariah*.

Pada sistem operasional bank *konvensional*, bunga(*interest*) merupakan faktor penting yang menjadi dasar pencatatan transaksi dan perhitungan-perhitungan ekonomis. Untuk kebijakan ekonomi makro, pemerintah sering melakukan intervensi dalam mempengaruhi besaran suku pasar uang yang dilakukan melalui penetapan Suku Bunga Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dan tingkat suku bunga Bank Sentral (*BI rate*).

Berdasarkan Peraturan pemerintah No. 66 Tahun 2008 tentang besaran Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak sebesar dua

miliar rupiah, berlaku pada tanggal 1 Oktober 2008. Pada tingkat bunga penjaminan, simpanan di bank baik pokok maupun bunga pembayarannya dijamin pemerintah. Adapun tingkat suku bunga Bank Indonesia (*BI Rate* merupakan instrumen kebijakan moneter, yang menjadi pertimbangan bank umum dalam penentuan tingkat bunga. Besaran bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) misalnya menjadi pertimbangan bank dalam menempatkan likuiditas yang tidak tersalurkan melalui kredit, dan alternatif dalam penyaluran likuiditas yang bebas risiko (*risk free*).

Menurut Karim (2002), upaya regulasi pemerintah dengan memainkan suku bunga untuk mengendalikan permintaan uang, justru mengakibatkan penyalahgunaan sumber dana untuk tujuan yang tidak produktif dan tindakan spekulatif. Hal ini bertentangan dengan *prinsip ekonomi Islam*. Dalam Islam, bunga secara tegas dilarang dan “*hukumnya riba*”.

Firman Allah dalam Al-Quran :

مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ رَبَّوْا مِنْ يَتَى مَا وَدَّوْا اللَّهَ اتَّقُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
لَا أَمْوَالِكُمْ رُءُوسٌ فَلَكُمْ تُبْتُمْ وَإِنْ وَرَسُولِهِ ءَلَّهِ مِنْ بَحْرٍ فَأَذْنُوا تَفْعَلُوا لَمْ فَإِنْ
تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (QS.Al-Baqarah:278-279)

Menurut beberapa literatur bukan hanya *syariah Islam* yang menolak pembungaan uang ini. Sejak zaman Yunani Kuno Aristoteles sangat menentang bunga. Demikian juga pelarangan bunga ini berlaku pada bagi kaum Yahudi maupun Nasrani dalam kitab suci mereka.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah tesis ini adalah rendahnya LDR perbankan konvensional. Rendahnya LDR ini sebagai akibat dari lebih lambannya pertumbuhan kredit yang disalurkan bank dibanding dengan pertumbuhan DPK yang dihimpunnya.

Akibat rendahnya penyaluran kredit diduga menjadi penyebab lambannya pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca krisis, dibanding dengan pertumbuhan ekonomi yang dicapai beberapa negara lain di Asia yang juga terkena dampak krisis yang sama. Seperti; Malaysia, Thailand dan Korea Selatan. (Harmanata, 2006). Adapun rendahnya penyaluran kredit, menurut sebagian pengamat disebabkan masih tingginya tingkat suku yang ditetapkan bank. Namun sebagian pengamat yang lain menolak pandangan tersebut, berdasarkan argumentasi; bahwa data historis menunjukkan bahwa posisi suku bunga sebelum krisis terjadi (1997) lebih tinggi dan rasio LDR jauh lebih tinggi dibanding kondisi saat ini. Argumentasi lainnya; dilihat dari sisi bank, bahwa banyak faktor determinan selain suku bunga yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan bank dalam menyalurkan kredit. Demikian juga dari sisi nasabah masih banyak faktor lain diluar suku bunga yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan suatu pembiayaan dengan fasilitas menggunakan kredit yang bank.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, pertanyaan penelitian, adalah :

1. Berapa besar kemampuan mobilisasi dana pihak ketiga bank dapat menjelaskan variasi kredit yang disalurkan untuk pembiayaan dunia usaha.
2. Berapa besar pengaruh suku bunga terhadap besaran variasi kredit yang disalurkan bank untuk tujuan pembiayaan dunia usaha.
3. Berapa besar pengaruh variasi suku bunga terhadap besaran variasi kredit yang disalurkan bank untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian adalah untuk memperoleh jawaban atas beberapa pertanyaan diatas dengan melakukan analisis.

1. Untuk mengetahui sejauh mana peran dana pihak ketiga yang dihimpun bank umum dapat menerangkan besarnya kredit yang disalurkan untuk bank pembiayaan dunia usaha.
2. Untuk mengetahui pengaruh suku bunga terhadap kredit yang disalurkan bank yang tujuannya untuk pembiayaan investasi dunia usaha.
3. Untuk mengetahui pengaruh suku bunga kredit modal kerja yang terhadap besarnya kredit yang disalurkan bank yang tujuannya untuk pembiayaan modal kerja.
4. Melakukan analisis untuk mengetahui pengaruh suku bunga kredit konsumtif terhadap besarnya kredit yang disalurkan bank untuk tujuan pembiayaan bersifat konsumtif.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, adalah :

1. Memberi informasi dan jawaban atas beberapa pertanyaan tersebut di atas.
2. Menjadi sumbangan pemikiran alternatif kebijakan dan solusi untuk mendorong pengembangan dunia usaha (sektor riil) melalui aplikasi sistem kegiatan ekonomi berbasis syariah.
3. Melalui tesis ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi kajian lebih lanjut, dan masukan untuk penelitian dan pengembangan aplikasi ekonomi Syariah di tanah air.

1.5. Pembatasan Masalah

Ruang-lingkup penelitian meliputi bank umum secara nasional periode Januari 2003 sampai dengan Desember 2008. Dengan pertimbangan luasnya variabel yang terkait, penelitian hanya membatasi terhadap beberapa variabel dominan dan relevan dengan maksud dan tujuan penelitian ini, dengan variabel utama; Dana Pihak Ketiga, Penyaluran Kredit/ Pembiayaan Dunia Usaha dan Suku Bunga

1.6. Kerangka Teori Tabungan, Investasi dan Suku bunga

Dalam pandangan konvensional, investasi yang dilakukan dalam suatu perekonomian akan seimbang dengan kemampuan menyediakan tabungan dalam perekonomian tersebut. Keseimbangan ini dicapai dan dipengaruhi melalui mekanisme tingkat suku bunga (*interest*). Para ahli ekonomi klasik berkeyakinan bahwa perubahan suku bunga akan membawa keseimbangan antara tabungan yang akan disediakan rumah tangga dan investasi yang akan dilakukan pengusaha. Setiap perubahan suku bunga akan cenderung menyebabkan perubahan dalam tabungan rumah tangga dan permintaan dana untuk investasi perusahaan. Perubahan suku bunga terus berlangsung sampai terjadi keseimbangan antara jumlah tabungan dengan jumlah permintaan dana investasi tercapai (Sukirno, 2006).

Kenaikan suku bunga akan mendorong masyarakat untuk meningkatkan jumlah tabungannya, kenaikan jumlah tabungan masyarakat yang disalurkan melalui bank akan meningkatkan kemampuan bank untuk menyalurkannya dalam bentuk kredit atau pembiayaan bagi pihak yang membutuhkan, baik untuk keperluan pembiayaan kegiatan usaha produktif, ataupun pembiayaan yang bersifat konsumtif. Dari sisi lain, kenaikan tingkat bunga akan meningkatkan biaya dana yang dipinjamkan (*cost of loanable fund*) sehingga meningkatkan beban biaya yang harus dipikul oleh debitur (peminjam) dan akhirnya cenderung menurunkan permintaan terhadap kredit.

Secara umum, faktor-faktor penting yang menentukan tingkat suku bunga (*interest rate*) adalah sebagai berikut:

1. Suplai dana dari para penabung, terutama sektor rumah tangga.
2. Permintaan terhadap dana dari sektor bisnis untuk keperluan pembiayaan investasi dalam bentuk pabrik, peralatan, dan persediaan (aset riil atau pembentukan modal).
3. Penawaran dan permintaan bersih pemerintah terhadap dana yang terlihat dari tindakan-tindakan bank sentral.

Ketiga faktor tersebut merupakan *variabel* yang menentukan besaran suku bunga riil (*real interest rate*) yang akan terjadi dalam suatu perekonomian. Sedangkan suku bunga nominal (*nominal interest rate*), adalah suku bunga yang

sebenarnya kita lihat, yaitu bunga riil ditambah dengan dengan tingkat inflasi yang diharapkan atau diperkirakan akan terjadi kedepan. Dengan demikian *faktor keempat* yang mempengaruhi suku bunga adalah tingkat inflasi yang diharapkan. (Bodie,dkk, 2006).

Sementara itu Fisher, sebagaimana dikutip Karim (2002) tidak lagi berbicara tentang *nominal interest* tetapi tentang *differential interest rate* antara *interest rate bonds*, *interest rate money*, *expected inflation* dan lain-lain yang secara matematis di notasikan sebagai berikut :

$$\underline{M}_d = f (Y_p, r_b - r_m, r_e - r_m, \pi^e - r_m)$$

Keterangan:

M_d	: <i>real money demand</i>
Y_p	: <i>permanent income</i>
r_b	: <i>return on bonds</i>
r_m	: <i>return on money</i>
r_e	: <i>return on equities</i>
π^e	: <i>expected inflation</i>

Berkaitan dengan suplai dari para penabung untuk keperluan kredit pembiayaan dunia usaha, dana pihak ketiga merupakan diterminan utama yang menentukan kemampuan penyalurkan kredit bank yang sebagian besar operasional kredit bank umum dibiayai dengan DPK, sementara permodalan bank itu sendiri kemampuannya sangat terbatas.

Apabila pemerintah menetapkan *cash ratio* atau RR dan GWM 5 % dari posisi DPK sebelumnya, maka secara matematis jumlah dana yang dapat disalurkan untuk pinjaman diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Lovable fund (LF)} = \text{DPK} - \text{RR (DPK)}$$

atau

$$100 - 5\% \text{ DPK} = 95\% \text{ DPK dari jumlah DPK.}$$

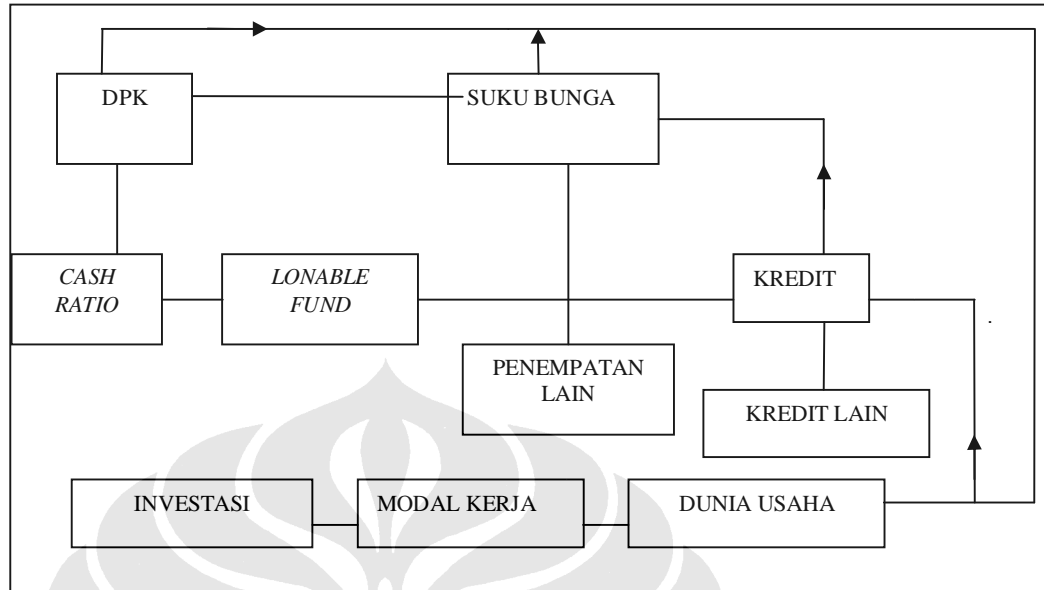
Berdasarkan formulasi tersebut besarnya kemampuan bank untuk menyalurkan kredit ditentukan oleh jumlah DPK yang berhasil dihimpunnya. Jumlah dana yang dapat disalurkan untuk dipinjamkan (*lonable fund*) dipengaruhi oleh minimum RR dan *cash ratio* yang ditetapkan pemerintah. Semakin besar DPK yang dihimpun bank, semakin leluasa bagi bank dalam penyalurkan

kecreditnya. Lemahnya kemampuan bank dalam mobilisasi DPK akan membuat bank kesulitan dana yang diperlukan untuk pembiayaan penyaluran kredit. Sementara itu kebijakan pemerintah dalam penetapan *RR* akan mengurangi kapasitas dana yang dapat dipinjamkan.

Kegiatan operasionalnya bank konvensional tidak dapat dipisahkan dari perhitungan-perhitungan suku bunga karena sebagian besar keuntungan bank bank ini bersumber dari selisih (*spread*) antara bunga yang dibayarkan bank kepada penyimpan dana (*saver*) atau penabung dengan bunga yang dibebankan bank kepada peminjam dana (*debitur*). Sehingga, metode untuk meningkatkan keuntungan di bisnis ini dilakukan dengan meminjamkan lebih banyak uang atau dengan meningkatkan selisih bunga (*spread*) (El Diwani, 2003). Dalam kegiatan penyaluran dana, bank memiliki banyak instrumen dan cara yang dilakukan. Selain disalurkan melalui kredit untuk pembiayaan dunia usaha, bank juga bank menyalurkan kredit untuk keperluan lain yang bersifat konsumtif, disamping bank juga menyalurkan dana dalam bentuk lain seperti penyertaan dalam suatu perusahaan (*equity partisipation*), pembelian surat-surat berharga (*scurities*) dan lain-lain.

Secara skematis aliran dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan yang disalurkan bank konvensional untuk pembiayaan dunia usaha sebagaimana dilukiskan pada gambar 1.1 sebagai berikut.

Gambar 1.1 Hubungan antar Variabel dalam Penelitian



1.7. Hipotesis

Dengan lebih cepatnya pertumbuhan DPK yang berhasil dihimpun bank dibanding perkembangan penyaluran kredit, untuk pembiayaan dunia usaha, dugaan sementara bahwa kemampuan bank dalam menyalurkan kredit untuk pembiayaan dunia usaha tidak berhubungan dengan kemampuan bank dalam menghimpun DPK. Karena banyak instrumen lain yang digunakan bank dalam menyalurkan likuiditasnya.

Demikian juga perkembangan suku bunga dan kredit yang disalurkan bank untuk pembiayaan dunia usaha diduga tidak berhubungan dengan perkembangan suku kredit yang ditetapkan bank selama ini.

Sehubungan dengan itu dalam tesis ini mengajukan beberapa hipotesis sebagai berikut:

1. $H_0: = 0$

Variasi besaran kredit yang disalurkan bank umum untuk pembiayaan dunia usaha tidak berhubungan atau dipengaruhi dana pihak ketiga yang berhasil dihimpunnya.

$H_1: \neq 0$

Variasi besaran kredit yang disalurkan bank umum untuk pembiayaan dunia usaha berhubungan atau dipengaruhi besaran dana pihak ketiga yang berhasil dihimpunnya

Besaran kredit yang disalurkan bank umum untuk pembiayaan investasi dunia usaha berhubungan dengan perkembangan Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpunnya.

2. $H_0: = 0$

Variasi besaran kredit yang disalurkan bank untuk pembiayaan investasi dunia usaha, tidak berhubungan atau dipengaruhi oleh tingkat suku bunga kredit investasi yang telah ditetapkan

$H_1: \neq 0$

Variasi besaran kredit yang disalurkan bank untuk pembiayaan investasi dunia usaha, berhubungan atau dipengaruhi oleh tingkat suku bunga kredit investasi yang telah ditetapkan

3. $H_0: = 0$

Variasi besaran kredit yang disalurkan bank untuk pembiayaan modal kerja dunia usaha, tidak berhubungan atau dipengaruhi oleh tingkat suku bunga kredit modal kerja yang telah ditetapkan

$H_1 : \neq 0$

Variasi besaran kredit yang disalurkan bank untuk pembiayaan modal kerja dunia usaha, berhubungan atau dipengaruhi oleh tingkat suku bunga kredit modal kerja yang telah ditetapkan

4. $H_0: = 0$

Variasi besaran kredit yang disalurkan bank untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, berhubungan atau dipengaruhi oleh tingkat suku bunga kredit konsumtif yang telah ditetapkan

$H_1 : \neq 0$

Variasi besaran kredit yang disalurkan bank untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, berhubungan atau dipengaruhi oleh tingkat suku bunga kredit konsumtif yang telah ditetapkan

1.8. Metode Penelitian

Dengan mengacu pada hasil analisis ekonometri yang dilakukan Metwally. (1995) tentang pengaruh suku bunga terhadap permintaan uang di negara - negara Islam kontemporer dan negara-negara non Islam, untuk menentukan sejauh mana peran yang dimainkan oleh tingkat bunga di negara-negara tersebut. Dengan menggunakan metode analisis regresi Metwally menggunakan variabel-variabel: Permintaan uang, M1 dan M2, tingkat harga, pendapatan nasional dan tingkat bunga, menyampaikan kesimpulan bahwa; Hasil regresi menunjukkan bahwa tingkat bunga tidak mempunyai peran yang signifikan dalam menetapkan permintaan uang atau investasi di negara-negara Islam yang diteliti. Namun dengan model regresi yang sama bahwa tingkat bunga merupakan determinan yang signifikan di negara-negara non muslim yang mempunyai struktur ekonomi yang sama dan tingkat kemajuan yang sebanding. Sedangkan Indonesia yang sebagian besar penduduknya muslim, tidak termasuk dalam sampel negara yang dianalisis dalam penelitian tersebut.

Dengan mengambil lokasi penelitian Bank Umum, tesis ini menggunakan data *sekunder* dalam bentuk *time series* dengan interval waktu mulai Januari tahun 2003 sampai dengan Desember 2008, dengan sumber data utama Statistik Perbankan Indonesia (SPI) dan Statistik ekonomi dan Keuangan Indonesia yang dipublikasikan Bank Indonesia. Jumlah sampel yang digunakan terdiri 72 buah sampel bulanan untuk masing-masing variabel unit yang dianalisis.

Analisis data penelitian menggunakan *metode ekonometri* yang pengolahan datanya dilakukan melalui program siap pakai SPSS 13 dengan langkah-langkah, tahapan dan metodologinya terdiri dari 6 langkah sebagaimana direkomendasikan Nachrowi dan Usman (2002) sebagai berikut :

1. Membuat suatu hipotesis/ pernyataan
2. Menduga model ekonometri untuk menguji hipotesis yang telah dibuat
3. Mengestimasi parameter model
4. Melakukan verifikasi model
5. Membuat prediksi
6. Menggunakan model untuk membuat kebijakan

Untuk mengetahui bagaimana pola hubungan antar variabel yang digunakan, analisis data dilakukan dengan teknik ekonometri menggunakan model analisis Regresi Linier Sederhana (*Single Liniers Regrssion*). Sedangkan analisis untuk mengukur bagaimana keeratan hubungan variabel-variabel yang diterangkan dalam persamaan regresi tersebut digunakan analisis korelasi dan kedua analisis regresi dan korelasi ini dipakai secara bersamaan.

1.9. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan

Tujuan dari bab ini, memberikan gambaran umum mengenai isi keseluruhan laporan penelitian yang diajukan dalam tesis ini. Terdiri dari 8 Sub Bab yang didalamnya menguraikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian sampai sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Literatur

Meliputi landasan-landasan teori sebagai kerangka konseptual untuk dapat merumuskan hipotesis penelitian. Meliputi teori maupun penelitian terdahulu dan publikasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Pembahasan diawali masalah pembiayaan dunia usaha, peran intermediasi bank dalam mobilisasi dana pihak ketiga penyaluran kredit dan suku bunga yang kontroversial baik antar ekonom maupun agamawan. Pada kesempatan bab ini juga diuraikan tentang kegiatan mobilisasi dana, investasi dan tentang bunga dalam persektif Islam.

Bab III Metodologi dan Data Penelitian

Membahas data penelitian dan model analisis yang digunakan. Didukung data yang terdiri dari data-data; perkembangan dana pihak ketiga (DPK), penyaluran kredit dan suku.

Bab IV Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini melakukan olah data dan pembahasan lebih lanjut hasil pengolahan data penelitian. Meliputi ;

1. Analisis deskriptif indikator perbankan
2. Peran mobilisasi dana pihak ketiga dalam penyaluran kredit untuk pembiayaan dunia usaha
3. Pengaruh suku bunga terhadap kredit investasi pembiayaan dunia usaha

4. Pengaruh suku bunga terhadap kredit pembiayaan modal kerja dunia usaha

Dengan menggunakan data dan metode analisis sebagaimana dikemukakan dalam bab III, sub bab ini memberikan interpretasi hasil penelitian dan berusaha menemukan jawaban atas beberapa pertanyaan dalam permasalahan yang diajukan tesis ini, sehingga sebagaimana dikemukakan dalam maksud dan tujuan penelitian dapat tercapai.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan penutup dari serangkaian tulisan dalam penelitian ini. Seluruh pembahasan, hasil perhitungan dan analisis data pada bab-bab terdahulu dirangkum dalam bab ini. Saran-saran dan direkomendasikan disampaikan sebagai solusi alternatif dalam pengambilan kebijakan, dan sebagai kontribusi terhadap pengembangan lebih lanjut dari permasalahan dan hasil penelitian ini

